

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Dengan memperhatikan uraian mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai selama periode 2013-2018, maka tahapan pembangunan dan penetapan indikator kinerja daerah adalah sebagai berikut.

9.1 Tahapan Pembangunan

Tahun 2013 merupakan penyiapan atau pra-kondisi bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang baik dan stabil. Dengan landasan tersebut, pelaksanaan strategi, kebijakan dan program pembangunan Provinsi Sumatera Selatan 2013-2018 meliputi lima (5) tahap pembangunan.

9.1.1 Tahap Konsolidasi: Penegasan Komitmen (2014)

Tahap pembangunan 2014 merupakan tahap pembangunan untuk menjaga, meneruskan dan melanjutkan capaian RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2013. Selain itu, tahap pembangunan ini juga menegaskan komitmen untuk meningkatkan mutu sumberdaya manusia. Tahap pembangunan 2014 terutama diarahkan tercapainya hal-hal berikut:

- 1) Meningkatnya mutu sumber daya manusia dengan memperluas akses pelayanan pendidikan dan kesehatan;
- 2) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan, dan perluasan lapangan kerja;
- 3) Tersedianya prasarana dasar seperti jalan, air bersih dan permukiman;
- 4) Terbangunnya infrastruktur strategis terutama pelabuhan, jalan dan jaringan infrastruktur pendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api;
- 5) Terbangunnya infrastruktur pendukung pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, serta pariwisata;
- 6) Berkembangnya industri pengolahan (hilirisasi) hasil pertanian kehutanan, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, dan pertambangan sebagai utama peningkatan nilai tambah, pencapaian masyarakat dan pendapatan daerah;
- 7) Tertatanya kawasan pertambangan dan pengelolaan hasil tambang;

- 8) Tertatanya dan berkembangnya tempat-tempat wisata daerah;
- 9) Berkembangnya pusat-pusat inovasi dan pengembangan daerah;
- 10) Terbangunnya perencanaan dan penganggaran berbasis sistem informasi (*e-planning*).

9.1.2 Tahap Penguatan: Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Industri Pengolahan Hasil Pertanian, dan Pariwisata (Hilirisasi) (2015)

Tahap pembangunan 2015 merupakan tahapan untuk mendorong transformasi Provinsi Sumatera Selatan melalui peningkatan peran industri pengolahan (hilirisasi) hasil pertanian dan pertambangan di Provinsi Sumatera Selatan. Tahap pembangunan ini mengutamakan peningkatan produktivitas dan nilai tambah pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, dan pariwisata; pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan pertambangan; pembangunan infrastruktur strategis terutama pembangunan jalan, pelabuhan, jaringan infrastruktur lainnya untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api; pembangunan prasarana dan sarana termasuk transportasi untuk mendukung pariwisata; serta pemberdayaan dan penguatan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK).

Tahap pembangunan 2015 terutama diarahkan untuk mendukung tercapainya hal-hal berikut:

- (1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang cepat, tepat, murah dan tidak berbelit-belit;
- (2) Meningkatnya mutu layanan pendidikan dan kesehatan;
- (3) Meningkatnya efektivitas penanggulangan kemiskinan dengan memperkuat sinergi antarSKPD, antara SKPD Provinsi dengan SKPD Kabupaten/Kota dan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah, serta kerjasama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan swasta;
- (4) Meningkatnya produktivitas, nilai tambah dan pendapatan industri pengolahan (hilirisasi) hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan dan perikanan;
- (5) Terbangunnya infrastruktur strategis pendukung KEK TAA;
- (6) Terbangunnya prasarana pendukung pengembangan pariwisata;
- (7) Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) terutama dengan meningkatnya akses permodalan, manajemen usaha, teknologi produksi, informasi dan pemasaran;
- (8) Berkembangnya pola kemitraan dan kerjasama investasi antara Pemerintah Provinsi, masyarakat dan swasta;
- (9) Tertatanya proses inovasi teknologi berbasis Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

9.1.3 Tahap Penguatan dan Percepatan: Percepatan Pembangunan Infrastruktur Strategis (2016)

Tahap pembangunan 2016 menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur strategis terutama pembangunan jalan, pelabuhan, jaringan infrastruktur lainnya untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api; pemantapan hilirisasi industri pengolah hasil dan pertanian dan pertambangan; pengembangan pariwisata berstandar internasional. Selain itu, tahap ini tetap mengutamakan peningkatan mutu sumber daya manusia, pengurangan pengangguran dan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan produktivitas dan nilai tambah pertanian, serta percepatan pembangunan perdesaan dan daerah tertinggal.

Tahap pembangunan 2016 terutama diarahkan untuk mendukung tercapainya hal-hal berikut:

- (1) Meningkatnya mutu sumber daya manusia;
- (2) Meningkatnya efisiensi dan efektivitas program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- (3) Terbangunnya infrastruktur strategis terutama pembangunan pelabuhan, jalan dan jaringan infrastruktur pendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api
- (4) Terbangunnya infrastruktur pendukung pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, serta pariwisata;
- (5) Meningkatnya produksi, produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, serta pariwisata;
- (6) Meningkatnya produktivitas, nilai tambah dan pendapatan industri pengolah hasil pertanian dan pertambangan;
- (7) Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) terutama dari meningkatnya akses permodalan, manajemen usaha, teknologi produksi, informasi dan pemasaran;
- (8) Berkembangnya pusat-pusat inovasi dan bisnis inovatif dalam menghasilkan keunggulan daerah;
- (9) Meningkatnya kerjasama riset unggulan.

9.1.4 Tahap Pemantapan: Percepatan dan Perluasan Hilirisasi Industri, dan Pengembangan Pariwisata Berstandar Internasional (2017)

Tahap pembangunan 2017 merupakan percepatan (akselerasi) dan perluasan hilirisasi industri pengolahan hasil pertanian dan pertambangan dengan didukung oleh pemantapan Kawasan Ekonomi khusus Tanjung Api-Api, pemanfaatan hasil ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi; dan peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK);

dan pengembangan pariwisata berstandar internasional di Provinsi Sumatera Selatan.

Tahap pembangunan 2017 terutama diarahkan untuk mendukung tercapainya hal-hal berikut:

- (1) Meningkatnya standar pelayanan pendidikan dan kesehatan sesuai standar nasional dan ASEAN;
- (2) Meningkatnya efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- (3) Terbangunnya dan tertatanya jaringan infrastruktur strategis pendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api;
- (4) Terbangunnya dan tertatanya infrastruktur pendukung pengembangan pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, serta infrastruktur pariwisata;
- (5) Meningkatnya produksi, produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, perkebunan, serta kelautan dan perikanan;
- (6) Berkembangnya kawasan/klaster industri sebagai simpul industri pengolahan berbasis pertanian dan pertambangan;
- (7) Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) terutama dari meningkatnya akses permodalan, manajemen usaha, teknologi produksi, informasi dan pemasaran;
- (8) Meningkatnya mutu jasa pariwisata sesuai dengan standar nasional dan ASEAN;
- (9) Meningkatnya nilai tambah dan perdagangan komoditas unggulan dari hasil pengembangan pusat-pusat inovasi;
- (10) Berkembangnya kerjasama riset unggulan sesuai standar nasional dan ASEAN.

9.1.5 Tahap Perwujudan: Sumatera Selatan Sejahtera, Lebih Maju dan Berdaya Saing Internasional (2018)

Tahap pembangunan 2018 merupakan tahapan untuk mewujudkan Provinsi Sumatera Selatan yang Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing Internasional yang berkelanjutan. Pada tahap pembangunan ini Provinsi Sumatera Selatan diharapkan menjadi salah satu pusat pendidikan dan kesehatan, pusat agribisnis dan agroindustri, dan pusat pariwisata yang maju dan berkembang di ASEAN.

Tahap pembangunan 2018 terutama diarahkan untuk mendukung tercapainya hal-hal berikut:

- (1) Meningkatnya standar pelayanan pendidikan dan kesehatan sesuai standar nasional dan ASEAN;
- (2) Tercapainya target pengurangan kemiskinan dan pengangguran;

- (3) Berkembangnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api sebagai kawasan/klaster dan simpul industri pengolahan berbasis pertanian dan pertambangan, dan perdagangan internasional;
- (4) Tercapainya kemandirian pangan daerah;
- (5) Terbangunnya industri olahraga dan jasa pariwisata yang bermutu sesuai dengan standar internasional;
- (6) Berkembangnya pusat inovasi dan *technopark* sesuai standar nasional dan ASEAN.

9.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja pembangunan merupakan tolok ukur yang digunakan untuk mengukur capaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018, serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan seluruh SKPD Provinsi Sumatera Selatan. Penetapan indikator kinerja dan capaian sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan indikator yang khusus, terukur, dapat dicapai, rasional dan memperhitungkan waktu pencapaian.

9.2.1 Indikator Makro Daerah

Indikator makro daerah merupakan indikator ekonomi dan sosial yang akan dicapai oleh seluruh SKPD melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang (2013-2018).

Tabel 9. 1

Indikator Makro Daerah
RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Sasaran					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	PDRB Harga Berlaku	Rp.Miliar	232,30	257,40	267,25	277,11	286,96	296,81
2	PDRB Harga Konstan 2000	Rp.Miliar	77.994	82.674	87.634	93.111	99.163	106.105
4	Pendapatan Per Kapita atas dasar harga konstan 2000	Rp. 000	9.987	10.440	10.913	11.435	12.010	12.673
5	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,00	6,00	6,00	6,25	6,50	7,00
6	Inflasi	Persen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
7	Pendapatan Daerah	Rp.Miliar	5.165,75	6.323,54	7.364,81	8.630,71	10.173,51	12.058,71
	• Pendapatan Asli Daerah	Rp.Miliar	2.214,42	2.482,13	2.788,59	3.161,96	3.618,16	4.177,69
	• Dana Perimbangan	Rp.Miliar	2.951,33	3.841,41	4.576,22	5.468,75	6.555,35	7.881,01
	• Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp.Miliar	813,34	813,34	821,47	829,68	837,98	846,36

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Sasaran					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
8	Investasi:							
	Nilai Investasi PMDN	Rp.Miliar	6.900	7.590	8.349	9.184	10.100	11.110
	Nilai Investasi PMA	Rp.Miliar	9.050	9.955	10.950	12.050	13.250	14.580
9	Jumlah Penduduk	Ribu jiwa	7.809,53	7.919,06	8.030,13	8.142,77	8.257,00	8.372,84
10	Laju Pertumbuhan penduduk	Persen	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
11	Persentase Penduduk Miskin	Persen	13,66	13,37	13,24	12,75	12,27	11,78
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,49	4,86	4,27	3,63	2,92	2,06
13	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73,99	74,29	74,60	74,90	75,20	75,51
14	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,30	70,50	70,70	70,90	80,10	80,30

9.2.2 Indikator Pembangunan Kabupaten/Kota

Indikator pembangunan kabupaten/kota merupakan indikator sosial dan ekonomi yang akan dicapai oleh kabupaten/kota melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang (2013-2018). Penetapan indikator kinerja pembangunan kabupaten/kota dimaksudkan untuk meningkatkan sinergi dan kerjasama antarSKPD Provinsi Sumatera Selatan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan antarkabupaten/kota.

Tabel 9. 2

Penetapan Indikator Kinerja Pembangunan Kabupaten/Kota
RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Ogan Komering Ulu	7,31	7,32	7,32	7,33	7,33	7,34
2	Ogan Komering Ilir	6,57	6,58	6,58	6,59	6,59	6,60
3	Muara Enim	5,42	5,44	5,44	5,46	5,46	5,50
4	Lahat	6,09	6,09	6,10	6,20	6,20	6,40
5	Musi Rawas	5,59	5,61	5,61	5,63	5,63	5,66
6	Musi Banyuasin	3,31	3,31	3,33	3,33	3,33	3,35
7	Banyuasin	6,25	6,26	6,27	6,28	6,30	6,32
8	OKU Selatan	7,31	7,33	7,34	7,35	7,37	7,40
9	OKU Timur	7,18	7,19	7,20	7,21	7,23	7,30
10	Ogan Ilir	7,00	7,15	7,19	7,22	7,24	7,27

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
11	Empat Lawang	6,22	6,24	6,26	6,34	6,39	6,45
12	Palembang	8,70	8,73	8,76	8,81	8,89	9,01
13	Prabumulih	5,70	5,72	5,75	5,77	5,80	5,90
14	Pagaralam	6,35	6,36	6,36	6,38	6,40	6,41
15	Lubuk Linggau	6,54	6,55	6,58	6,60	6,62	6,64
16	Penukal Abab Lematang Ilir						
17	Musi Rawas Utara						
18	Sumatera Selatan	6,00	6,00	6,00	6,25	6,50	7,00

Tabel 9. 3

Penetapan Indikator Kinerja Pembangunan Kabupaten/Kota
RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

No	Kabupaten/Kota	Persentase Kemiskinan					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Ogan Komering Ulu	11,19	10,83	10,56	10,29	10,03	9,78
2	Ogan Komering Ilir	14,53	13,81	13,07	12,37	11,71	11,08
3	Muara Enim	13,21	12,89	12,52	12,15	11,80	11,46
4	Lahat	17,45	16,86	16,29	15,74	15,20	14,68
5	Musi Rawas	17,67	17,20	16,71	16,24	15,78	15,33
6	Musi Banyuasin	18,29	17,82	17,45	17,09	16,73	16,38
7	Banyuasin	11,27	10,84	10,39	9,95	9,53	9,13
8	OKU Selatan	10,49	10,14	9,65	9,19	8,75	8,33
9	OKU Timur	8,98	8,71	8,46	8,21	7,98	7,75
10	Ogan Ilir	12,79	12,26	11,74	11,25	10,77	10,32
11	Empat Lawang	13,36	13,10	12,63	12,17	11,72	11,30
12	Palembang	13,59	13,06	12,44	11,84	11,27	10,73
13	Prabumulih	11,71	11,30	10,90	10,52	10,15	9,79
14	Pagaralam	9,00	8,59	8,17	7,78	7,41	7,05
15	Lubuk Linggau	13,88	13,64	13,36	13,08	12,81	12,55
16	Penukal Abab Lematang Ilir						
17	Musi Rawas Utara						
18	Sumatera Selatan	13,66	13,37	13,24	12,75	12,27	11,78

Tabel 9. 4

Penetapan Indikator Kinerja Pembangunan Kabupaten/Kota
RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

No	Kabupaten/Kota	Persentase Pengangguran Terbuka					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Ogan Komering Ulu	5,40	5,01	4,61	4,21	3,80	3,39
2	Ogan Komering Ilir	10,95	8,37	8,74	8,52	8,25	7,94
3	Muara Enim	4,59	4,17	3,87	3,37	2,78	2,10
4	Lahat	4,46	4,20	4,14	3,98	3,72	3,41
5	Musi Rawas	1,78	1,84	1,92	1,85	1,79	1,53
6	Musi Banyuasin	6,39	5,97	5,37	4,81	4,15	3,47
7	Banyuasin	5,17	5,13	5,02	4,85	4,57	4,24

8	OKU Selatan	2,81	2,79	2,69	2,50	2,22	1,93
9	OKU Timur	2,62	2,64	2,45	2,29	2,08	1,82
10	Ogan Ilir	5,86	5,40	4,89	4,33	3,81	3,09
11	Empat Lawang	2,87	2,85	2,83	2,78	2,68	2,54
12	Palembang	10,06	10,02	9,75	9,53	9,25	8,93
13	Prabumulih	8,83	8,62	8,15	7,72	7,22	6,67
14	Pagaralam	3,91	4,03	3,97	3,95	3,87	3,76
15	Lubuk Linggau	6,85	6,34	5,47	4,66	4,75	4,66
16	Penukal Abab Lematang Ilir						
17	Musi Rawas Utara						
18	Sumatera Selatan	5,49	4,86	4,27	3,63	2,92	2,06

Tabel 9. 5

Penetapan Indikator Kinerja Pembangunan Kabupaten/Kota
RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

No	Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Ogan Komering Ulu	74,01	74,32	74,64	74,95	75,26	75,58
2	Ogan Komering Ilir	71,45	71,73	72,00	72,28	72,55	72,83
3	Muara Enim	71,65	71,92	72,19	72,45	72,72	72,99
4	Lahat	72,29	72,64	73,00	73,35	73,70	74,05
5	Musi Rawas	69,01	69,33	69,66	69,98	70,31	70,63
6	Musi Banyuasin	73,15	73,57	73,99	74,41	74,83	75,26
7	Banyuasin	70,70	70,95	71,20	71,46	71,71	71,96
8	OKU Selatan	72,29	72,53	72,77	73,01	73,25	73,50
9	OKU Timur	70,72	71,03	71,34	71,65	71,96	72,27
10	Ogan Ilir	70,52	70,80	71,08	71,37	71,65	71,93
11	Empat Lawang	69,69	69,99	70,29	70,60	70,90	71,20
12	Palembang	77,38	77,67	77,97	78,26	78,55	78,84
13	Prabumulih	75,45	75,80	76,16	76,51	76,86	77,21
14	Pagaralam	74,15	74,44	74,74	75,03	75,33	75,62
15	Lubuk Linggau	71,46	71,73	71,99	72,26	72,53	72,79
16	Penukal Abab Lematang Ilir						
17	Musi Rawas Utara						
18	Sumatera Selatan	73,99	74,29	74,60	74,90	75,20	75,51

9.2.3 Indikator Kinerja Pembangunan Misi Kesatu

Indikator kinerja pembangunan daerah merupakan indikator kinerja utama dan sasaran yang akan dicapai oleh seluruh SKPD melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang (2013-2018) sesuai dengan Misi RPJMD Kesatu: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi.

Tabel 9. 6

Penetapan Indikator Kinerja Daerah untuk Misi Kesatu
RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

No	Urusan dan Indikator Kinerja	Satuan	Target					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
Urusan Wajib								
A. Urusan Pekerjaan Umum								
1	Cakupan Penanganan Drainase Permukiman	Kab/Kota	3	3	3	3	3	3
2	Jumlah kawasan kumuh yang tertangani	Kawasan	3	3	3	3	3	3
3	Jumlah kawasan layak huni yang tertangani	Kawasan	3	2	2	2	2	2
4	Cakupan penanganan TPA Sampah	Kab/Kota	3	2	2	2	2	2
5	Jumlah kawasan agropolitan yang tertangani	Kab/Kota	2	2	2	2	2	2
6	Persentase panjang jalan terbangunan panjang jalan ditingkatkan/dilebarkan	%	16,15	4,41	7,59	6,83	21,72	25,85
7	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	81,6	82	84	85	85	85
B. Urusan Perencanaan Pembangunan								
1	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang KEK:							
	- Jalan	Km	Na	na	9,75	na	na	na
	- Air Bersih	L/Det	na	na	na	2.399	na	Na
	- Lahan	Ha	na	na	217	na	na	na
	- Drainase	Km	na	na	na	9,24	na	na
	- IPAL	Unit	na	na	na	1	na	na
	- WTP	Unit	na	na	na	1	na	na
	- Perkantoran	Ha	na	na	na	9,12	na	na
C. Urusan Perhubungan								
1	Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	%	<25	<22	<19	<15	<13	<10
2	Jumlah penumpang yang terlayani melalui angkutan sungai dan danau	org/th	115.000	121.000	127.000	133.000	140.000	147.000
3	Meningkatnya keterangkutan penumpang pesawat udara pada SMB II ataupun kawasan barat Sumsel dan tumbuhnya penerbangan perintis antar daerah	org/th	2,8 jt	2,90 jt	3,00 jt	3,10 jt	3,18 jt	3,20 jt

No	Urusan dan Indikator Kinerja	Satuan	Target					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
4	Persentase menurunnya pelanggaran kelebihan muatan (over loading)	%	45	40	30	20	15	10
5	Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas perkotaan, khususnya kasus kecelakaan yang melibatkan pejalan kaki dan unmotorized	%	<25	22	19	15	13	10
6	Jumlah penumpang dan kendaraan melalui Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api	Org/th	na	48.000	60.000	75.000	90.000	100.000
7	Jumlah Pengguna KA Perkotaan Palembang Metropolitan (Plg-Inderalaya)	Org/th	110.000	120.000	130.000	135.000	140.000	145.000
8	Jumlah penumpang angkutan laut	Org/th	510.857	536.400	563.220	591.381	620.920	651.997
9	Jumlah barang dengan angkutan laut	Ton/th	17.755.873	18.643.667	19.575.850	20.554.642	21.582.375	22.661.493
10	Jumlah barang dengan angk. darat	Ton/th	9.705.112	10.190.368	10.699.886	11.234.880	11.796.624	12.386.456
11	Jumlah barang dengan angkutan kereta api	Ton/th	14.070.108	1.773.613	15.512.294	16.287.909	17.102.304	17.957.419
12	Jumlah barang dengan angkutan udara	Ton/th	11.730	12.317	12.932	13.579	14.258	14.971
13	Persentase kendaraan yang laik jalan	%	36	40	50	58	65	70
14	Jumlah bus pariwisata	Unit Bus	76	86	96	106	116	126
D. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah								
1	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru	UKM	na	150	400	700	1.050	1.500
E. Urusan Penanaman Modal								
1	Nilai Realisasi Investasi PMDN	Rp. Triliun	3,129	7,59	8,349	9,184	10,1	11,11
2	Nilai Realisasi Investasi PMA	Rp. Triliun	14,825	9,96	10,95	12,05	13,25	14,58
E. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah								
a Penelitian & Pengembangan Inovasi Daerah								
1	Jumlah pusat belajar Iptekin	Pusat Belajar	10	2	3	3	3	3
2	Jumlah HKI terdaftar	HKI	2 HKI	3 HKI	3 HKI	3 HKI	3 HKI	14 HKI
3	Jumlah Technopark	STP	0	0	0	0	1	1
4	Jumlah Pusat Inovasi di Kab/kota	PI	3	3	3	4	4	17

No	Urusan dan Indikator Kinerja	Satuan	Target					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
5	Jumlah Produk bisnis inovatif baru	%	0	0	30	30	40	100
6	Jumlah teknologi hasil litbang yg dimanfaatkan	Teknologi	9	9	10	12	12	52
7	Jumlah kemitraan strategis IPTEKIN yang menjalin PKS dan MoU	Dokumen perjanjian	10	2	3	3	3	3
8	Jumlah pelayanan IPTEKIN di daerah	Unit	3	2	2	3	3	3
Urusan Pilihan								
A. Urusan Pertanian								
1	Produksi Pertanian							
	Produksi Padi	Ton	3.676.722	3.986.098	4.125.611	4.270.088	4.419.461	4.574.142
	Produksi Jagung	Ton	167.457	172.481	177.655	182.985	188.474	194.128
	Produksi Kedelai	Ton	5.135	15.886	16.459	17.317	18.219	19.168
	Produksi Karet	Ton	1.091.146	1.100.000	1.150.000	1.180.000	1.200.000	1.250.000
	Produksi Kelapa Sawit	Ton	2.214.349	2.250.000	2.260.000	2.270.000	2.280.000	2.300.000
	Produksi Kelapa	Ton	60.095	60.000	61.000	61.500	62.000	62.500
	Produksi Kopi	Ton	139.754	140.000	141.000	142.000	144.000	145.000
	Produksi Daging	Ton	62.670	65.350	69.240	73.370	77.750	82.315
	Produksi Susu	liter	78.984	86.880	95.568	105.128	115.640	127.208
	Produksi Telur	ton	67.284	71.364	75.692	80.283	85.152	90.316
	Produksi Ikan Tangkap	Ton	95.717,3	95.908,7	96.100,5	96.292,7	96.485,4	96.678,3
	Produksi Ikan Budidaya	Ton	435.000	478.500	526.350	578.985	636.884	700.572
2	Penyuluh Pertanian	Org	1.950	2.000	2.050	2.100	2.150	2.200
3	Jumlah peningkatan kelas kelompok pelaku utama	Unit	na	300	375	450	525	600
4	Jumlah penumbuhan gabungan kelompok pelaku utama	Unit	na	100	125	150	175	200
5	Jumlah pelaku usaha teregistrasi	Unit	na	25	75	125	175	200
6	Jumlah teknologi yang dikembangkan	Unit	na	3	8	13	18	23
7	Rata-rata Harga Produk Pertanian di Tingkat Petani	%	2,02	3,04	2,80	3,10	2,70	2,77

No	Urusan dan Indikator Kinerja	Satuan	Target					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
B. Urusan Kehutanan								
1.	Jumlah produksi kayu dan HTI	Juta m ³ /th	70	4,25	4,50	5,00	5,50	6,00
2	Sumbangan Sektor Kehutanan	Rp. M	30,357	13,5	22,69	21,00	19,35	20,32
C. Urusan Kelautan dan Perikanan								
1	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	%	111,96	113,00	114,00	115,00	116,00	117,00
D. Urusan Perdagangan								
1	Nilai Ekspor	US \$ Jt /th	2.722,10	2.790,15	2.858,20	2.926,25	2.994,30	3.062,35
2	Pertumbuhan Ekspor	(%)	2,00	2,50	3,00	3,00	3,50	4,00
3	Nilai Perdagangan Antar Wilayah/ Perdagangan Antar Pulau (Moda Transportasi Laut)	(Ton)	1.604.086	1.727.752	1.851.418	1.975.084	2.098.750	2.222.416
E. Urusan Industri								
1	Jumlah Produksi Industri Pengolahan	Ton	1.769.864	1.814.110	1.858.357	1.902.603	1.946.850	1.991.097
2	Pertumbuhan Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan	%	2,50	3,00	3,50	3,50	4,00	4,00
3	Pertumbuhan Investasi di Sektor Industri Pengolahan	%	2,00	2,00	2,50	2,50	3,00	3,00
4	Jumlah Klaster Industri Unggulan Daerah	Unit Usaha	4	5	5	5	5	5
5	Jumlah IKM Pangan	Unit Usaha	23.305	24.233	25.161	26.089	27.017	27.945
6	Jumlah IKM kerajinan sandang dan kulit serta kerajinan dan umum	Unit Usaha	7.784	8.053	8.321	8.590	8.858	9.127
7	Jumlah Klaster Industri Unggulan Daerah / Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID)/Rencana Inti Pengembangan Industri Daerah (RIPID) yang Ditetapkan	Perda/Perkada	na	na	2	2	2	2
F. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral								
1	Produksi Batubara	Juta Ton	84,81	23,13	23,80	24,50	25,20	26,00
2	Lifting Minyak bumi	Ribu Barrel	132.236	26.917	27.116	27.316	27.518	27.721

No	Urusan dan Indikator Kinerja	Satuan	Target					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
3	Lifting Gas Bumi	Ribu MMBTU	2.741.311	609.246	613.410	617.602	621.822	626.072
4	Nilai PNB P Pertambangan (Royalti dan Landrent)	Milyar	438,60	152,34	163,93	176,40	189,83	204,28
5	Nilai PNB P Minyak Bumi	Milyar	1.123,34	293,69	305,66	318,12	331,09	344,58
6	Nilai PNB P Gas Bumi	Milyar	2.451,30	737,02	780,58	826,71	875,57	927,31
7	PAD	Juta	170,96	82,98	90,06	97,75	106,09	115,15
9	Rasio Desa Berlistrik	Persen	66,77	71,03	75,57	80,39	85,53	90,99
10	Jumlah produksi listrik	Gwh	6.678	6.878	7.085	7.298	7.517	7.743
11	Share PDRB Sektor Pertambangan	%	1,45	1,48	1,50	1,51	1,53	1,55
G. Urusan Pariwisata								
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Orang	3.243.313	3.340.612	3.440.830	3.554.055	3.650.377	3.759.888
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	31.408	32.350	33.321	34.320	35.349	36.409
3	Jumlah Daya Tarik Wisata yang Dikembangkan	DTW/ Tempat wisata	26	28	32	38	42	46
4	Jumlah Sanggar Seni yang Berkembang	Sanggar	200	210	220	230	240	250
5	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Usaha Pariwisata	Orang	42.662	43.869	45.110	46.386	47.698	49.047

9.2.4 Indikator Kinerja Misi Kedua

Indikator kinerja pembangunan daerah merupakan indikator kinerja utama dan sasaran yang akan dicapai oleh seluruh SKPD melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang (2013-2018) sesuai dengan Misi RPJMD Kedua: Memantapkan Stabilitas Daerah.

Tabel 9. 7

Penetapan Indikator Kinerja Daerah untuk Misi Kedua
RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

No	Urusan dan Indikator Kinerja	Satuan	Target					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
Urusan Wajib								
A. Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah								
1	Jumlah ringkasan dokumen Perencanaan yang dapat diakses publik	Dokumen	15	16	16	16	17	18
2	Persentase penerapan Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik	%	na	na	66	85	100	100

No	Urusan dan Indikator Kinerja	Satuan	Target					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
B. Urusan Penanaman Modal								
	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang diterbitkan	Ijin/ no ijin	172	189	208	229	252	277
	Jangka waktu perijinan dan non perijinan pada unit PTSP yang selesai sesuai dengan SOP	Hari	7	7	6	6	5	5
C. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
a. Kesatuan Bangsa								
1	Jumlah Kasus Konflik Kepengurusan Partai Politik	kali	1	0	0	0	0	0
2	Jumlah Konflik Pendirian rumah ibadah yang ditangani	Kali	2	1	1	1	0	0
3	Jumlah Forum Pemuda Antar Umat Beragama yang aktif	forum	1	1	3	6	9	18
4	Jumlah Anggota FKUB yang aktif	orang	200	276	310	310	310	310
5	Jumlah kasus konflik antar umat beragama	kali	1	0	0	0	0	0
6	Jumlah organisasi dan lembaga budaya masyarakat yang aktif	ormas	23	35	52	64	72	85
7	Persentase masyarakat yang terlibat aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan	%	20	20	20	20	20	20
8	Jumlah Anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yang Aktif	orang	200	225	235	245	275	300
9	Jumlah kasus konflik antar anggota masyarakat	kali	20	18	15	12	10	8
10	Jumlah Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang aktif	orang	105	105	119	125	136	153
11	Jumlah Organisasi Masyarakat yang menjalin kerjasama dengan pemerintah	Orkes- mas	558	600	615	630	650	675
12	Persentase penduduk yang ikut dalam Pemilu dan Pemilukada	%	67	76	70	70	70	70
13	Jumlah kasus sengketa Pemilu dan Pemilukada	Kasus	3	1	3	0	1	5
14	Persentase kasus sengketa Pemilu dan Pemilukada	%	100	100	100	100	100	100

No	Urusan dan Indikator Kinerja	Satuan	Target					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
b. Satuan Polisi Pamong Praja								
1	Jumlah kasus pelanggaran perda	kasus	75	75	150	225	225	225
D. Urusan Otonomi Daerah, Pemeritahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah								
a. Sekretariat Daerah								
1	Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	B	B	B	B	B	B
b. Sekretariat DPRD								
1	Persentase anggota DPRD yang aktif dalam perumusan kebijakan publik	%	60	65	70	75	78	80
2	Jumlah masukan partai politik dalam perumusan kebijakan publik	Masukan	40	40	40	40	40	40
3	Jumlah masukan organisasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik	Masukan	na	12	15	18	20	22
c. BPKAD								
1	Status Laporan Keuangan Daerah	Opini	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
d. Inspektorat								
1	Persentase SKPD dengan status laporan kinerja baik	%	60	65	75	75	80	85
2	Persentase peningkatan nilai laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	%	na	75	78	80	82	84
e. KORPRI								
1	Jumlah anggota KORPRI yang mendapat pembinaan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani	Orang	2.700	2.750	2.800	2.900	3.000	3.500
2	Jumlah anggota KORPRI yang mendapat pembinaan sikap kepedulian sosial	Orang	200	220	250	260	340	460
3	Jumlah anggota KORPRI yang mendapat pembekalan keterampilan kewirausahaan	Orang	250	250	260	280	320	400

No	Urusan dan Indikator Kinerja	Satuan	Target					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
E.	Urusan Kepegawaian							
a.	Pendidikan dan Pelatihan							
1	Jumlah Sumber daya aparatur yang kompeten dan profesional	orang	440	640	680	710	640	690
2	Jumlah sumber daya Widya-iswara yang kompeten dan profesional	Widya-iswara	24	27	30	34	37	40
b.	Kepegawaian							
1	Persentase pelanggaran disiplin PNS Prov. Sumsel	%	30	20	12	9	6	3
2	Pelayanan administrasi data kepegawaian berbasis WEB	%	20	23	55	77	85	96
Urusan Pilihan								
A.	Urusan Ketahanan Pangan							
1	Ketersediaan dan cadangan pangan - Ketersediaan energi per kilo kalori per kapita per hari minimal 2.200	Kkal/kap/hari	4.121	4.327	4.543	4.770	5.009	5.259
	- Ketersediaan protein per gram per kapita per hari minimal 57	Gram/Kap/hari	98	103	108	113	119	125
2	Distribusi dari akses pangan - Sistem distribusi pangan yang lancar antara waktu antar wilayah dan stabilitas harga pangan pokok strategis	Komoditi	9	10	13	13	13	13
3	Penganeka ragaman dan keamanan pangan - Pola pangan harapan	skor	89,39	85,76	88,61	91,46	94,31	97,15
	- Pangan segar yang aman dikonsumsi	Sampel	30	21	51	68	85	102
4	Penanganan Rawan pangan	%/tahun	10	20	60	60	60	60

9.2.4 Indikator Kinerja Misi Ketiga

Indikator kinerja pembangunan daerah merupakan indikator kinerja utama dan sasaran yang akan dicapai oleh seluruh SKPD melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang (2013-2018) sesuai dengan Misi RPJMD Ketiga: Meningkatkan Pemerataan yang Berkadilan.

Tabel 9. 8

Penetapan Indikator Kinerja Daerah untuk Misi Ketiga
RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

No	Urusan dan Indikator Kinerja	Satuan	Target					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
Urusan Wajib								
A.	Urusan Pendidikan							
a.	Pendidikan							
1	APK SD	%	110,81	111,02	111,80	112	112,06	113
2	APM SD	%	95,06	97	99	101	102	103
3	APK SMP	%	85,85	87	90	94	97	100
4	APM SMP	%	71,78	72	74	76	78	80
5	APK SMA/K	%	62,78	64	68	72	76	80
6	APM SMA/K	%	50,92	53	56	59	62	65
7	APtS SD	%	1,2	0,8	0,6	0,4	0,3	0,2
8	APtS SMP	%	10,13	9,87	8,49	7,42	6,31	5,50
9	APtS SMA/K	%	39,41	32	28	17	10	5
10	Jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan inklusif	%	75	10	10	10	10	10
11	Jumlah SMP/SMA satu atap	%	0	0	17	34	68	102
12	Angka Kelulusan SD	%	99,39	99,55	99,62	99,75	99,81	99,9
13	Angka Kelulusan SMP	%	99,97	99,90	99,90	99,90	99,90	99,90
14	Angka Kelulusan SMA/K	%	99,94	99,90	99,90	99,90	99,90	99,90
15	Angka Melek Huruf	%	99,77	99,78	99,80	99,82	99,84	100
16	SMA yang memiliki Lab dan Bengkel Keterampilan	%	20	22	27	29	32	35
17	APK Perguruan Tinggi	%	17	19	21	23	26	30
b.	Perpustakaan							
1	Jumlah diversifikasi layanan perpustakaan	jenis	16	16	18	20	23	25
2	Jumlah masyarakat yang mengakses perpustakaan	orang	121.168	171.268	235.650	289.300	350.500	400.350

No	Urusan dan Indikator Kinerja	Satuan	Target					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
3	Jumlah bahan pustaka yang dapat diakses oleh pemustaka	Eks	316.443	318.303	320.763	323.823	327.383	331.443
4	Jumlah perpustakaan yang dibina	Unit	2.418	2.493	2.593	2.718	2.868	3.043
B. Urusan Kesehatan								
1	Jumlah Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	Orang	123	120	115	110	105	100
2	Angka Harapan Hidup	%	70,30	70,50	70,70	70,90	80,10	80,30
3	Prevalensi balita dengan berat badan rendah (angka gizi buruk)	%	0,45	<1	<1	<1	<1	<1
4	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	Orang	144	142	140	138	136	134
5	Persentase kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih	%	93,1	94	95	98	99	100
6	Angka pemakaian kontrasepsi bagi pasangan usia subur	%	56,6	60	62	65	67	70
7	Rasio antara kebutuhan KB dan KB yang tidak terpenuhi	%	8,1	7,5	7,0	6,0	5,5	5,0
8	<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>		2,7	2,6	2,4	2,2	2,1	2,0
9	Jumlah orang umur >15 tahun yang melakukan KTS (konseling dan testing sukarela)	orang	20.044	23.385	27.126	31.466	36.500	42.340
11	Angka Kesembuhan Penderita TB Paru (BTA +)	%	113	119	125	132	139	146
12	Angka Kesakitan Penyakit DBD Per 100.000 penduduk		52	51	50	49	48	47
13	<i>Annual Parasit Incidence (API)</i>	Per 1000 penddk	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
14	Persentase Rumah Sehat	%	64,7	67,7	70,8	73,9	76,4	80
15	Persentase Keluarga yang Memiliki Akses Air Bersih	%	64	67,2	70,4	73,6	76,8	80
16	Jumlah Kasus Narkoba yang direhabilitasi	Orang	102	98	94	90	86	82

No	Urusan dan Indikator Kinerja	Satuan	Target					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
17	Jumlah Kunjungan Penderita narkoba Meningkat	Orang	366	376	387	400	415	425
18	Jumlah Kasus Gangguan Jiwa	Orang	5.600	3.000	2.850	2.700	2.640	2.555
19	Jumlah Kunjungan Penderita Gangguan Jiwa	Orang	41.208	43.208	45.208	47.208	49.208	51.208
20	Jumlah Kasus Pasung	orang	150	120	80	40	20	-
C. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
1	Jumlah SKPD provinsi yang mengimplemen- tasikan PPRG	SKPD	15	22	29	46	43	50
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	68,92	69,32	69,83	70,63	71,13	71,48
3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	67,05	67,48	67,95	68,32	69,18	70,12
4	Jumlah SKPD prov yang memiliki dan memanfaatkan Data Terpilih	SKPD	25	29	32	37	39	41
5	Jumlah kelompok usaha perempuan yang dibina	Klmpk	295	303	311	319	327	335
6	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani	Kasus	263	245	228	211	197	183
7	Jumlah kasus perdagangan perempuan dan anak yang ditangani	kasus	17	15	13	11	10	9
8	Jumlah kasus pelanggaran hak hak anak yang dilaporkan dan ditangani	kasus	295	303	311	319	327	335
D. Urusan Sosial								
1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mampu melaksanakan fungsi sosialnya	%	1.00	4.98	5.72	6.58	7.57	8.70
E. Urusan Ketenagakerjaan								
1	Jumlah Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	Orang	44	60	80	100	120	140
2	Jumlah TKI yang dikirim ke LN legal	Orang	1.107	1.645	1.884	1.931	2.040	2.285

No	Urusan dan Indikator Kinerja	Satuan	Target					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
3	Angka pencari kerja yang dilatih di BLK/LLK yang telah ditempatkan	Orang	3.288	3.650	4.015	4.417	4.859	5.345
4	Jumlah sarana dan prasarana BLKI	Unit	5	3	14	17	15	13
5	Jumlah Penduduk Yang bekerja	orang	3.464.620	3.516.589	3.569.336	3.622.878	3.677.221	3.732.380
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	66.50	67.14	67.78	68.42	69.06	69.70
7	Pengangguran Terbuka	orang	182.376	182.358	182.340	182.321	182.303	182.285
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		5.00	4.85	4.70	4.50	4.23	3.98
9	Upah/Gaji Pekerja Lajang terendah berdasarkan tingkat pendidikan terendah, jabatan terendah serta masa kerja terendah	Rp.Juta	1.630.000	1.825.600	2.062.928	2.331.108	2.634.152	2.976.926
10	Jumlah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Kasus	112	123	135	148	162	178
E. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah								
1	Nilai Modal Koperasi	Rp. M	1.692,79	1.726,65	1.760,50	1.794,36	1.828,21	1.862,07
2	Pertumbuhan Modal Koperasi	%	2	2	2	2	2	2
3	Nilai volume usaha koperasi	Rp.M	2.688,47	2.742,24	2.796,0	2.849,77	2.903,54	2.957,31
4	Pertumbuhan volume usaha koperasi	%	2	2	2	2	2	2
5	Nilai Modal UMKMK	Rp. M	9.362,70	9.469,05	9.575,40	9.681,73	9.788,08	9.894,42
6	Omzet UMKMK	Rp.M	24.720,84	24.970,51	25.220,18	25.469,85	25.719,52	25.969,20
7	Penyerapan tenaga kerja sektor UMKMK	Orang	2.950.438	2.972.653	2.994.879	3.017.104	3.039.329	3.091.554
F. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral								
1	Persentase desa dengan akses listrik	%	91,31	92,30	93,16	94,02	94,90	95,78
G. Urusan Kepemudaan dan Olahraga								
1	Jumlah pemuda yang difasilitasi	Orang	3097	1974	2529	3656	4156	4756
2	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi	OKP	15	15	17	18	19	20

No	Urusan dan Indikator Kinerja	Satuan	Target					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
3	Jumlah sarana dan prasarana kepemudaan	Unit	na	na	na	6	6	6
4	Jumlah anggota Pramuka yang difasilitasi dalam kepanduan	Orang	2.330	2.730	2.720	4.300	4.300	4.300
5	Jumlah usaha-usaha Baru yang Dikelola oleh Pemuda	Orang/unit	60	40/20	40/30	600/50	600/50	600/50
6	Jumlah pemuda yang dapat difasilitasi meningkatkan pengetahuan terhadap bahaya narkoba, pornografi, pornoaksi, dan HIV/AIDS	Orang	na	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
7	Jumlah tenaga keolahragaan yang bersertifikat	Orang	na	na	70	355	355	355
8	Jumlah Produsen peralatan olahraga yang dapat difasilitasi	Orang/Produ-sen	na	na	50/2	50/4	50/8	50/10
9	Jumlah masyarakat yang ikut permasalahan olahraga	Orang	5.328	8.725	5.267	6.787	10.447	11.437
10	Jumlah medali emas atlet PPLP	Medali	15	17	20	23	25	30
11	Jumlah prestasi atlet pada PON	Peringkat	13	na	na	10	na	Na
12	Jumlah sarana dan prasarana olahraga	Ponpes /Cabor	40/21	25/75	50/150	50/150	50/150	50/150
H. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
1	Jumlah Organisasi dan Lembaga Desa yang Aktif	Organi-sasi	14.230	14.414	14.638	14.910	15.236	15.626
2	Persentase masyarakat yang terlibat dalam organisasi dan lembaga masyarakat desa	% keterli-batan	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
3	Persentase masyarakat yang ikut dalam Musyawarah Perencanaan Desa	%	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
4	Persentase Desa yang Melaksanakan Musrenbangdes	%	60-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95

No	Urusan dan Indikator Kinerja	Satuan	Target					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
5	Persentase aparatur pemdes yang tertib administrasi dan penduduk yang memiliki dokumen kependudukan (Akte, KTP, Jamkesmas)	%	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90
6	Persentase Aparatur Desa yang Profesional	%	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55

9.2.5 Indikator Kinerja Misi Keempat

Indikator kinerja pembangunan daerah merupakan indikator kinerja utama dan sasaran yang akan dicapai oleh seluruh SKPD melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang (2013-2018) sesuai dengan Misi RPJMD Keempat: Pengelolaan Lingkungan yang Lestari dan Penanggulangan Bencana.

Tabel 9. 9

Penetapan Indikator Kinerja Daerah untuk Misi Keempat
RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

No	Urusan dan Indikator Kinerja	Satuan	Target					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
Urusan Wajib								
A.	Lingkungan Hidup							
1	Laju penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	IKLH	61,41	58,86	56,55	53,77	51,226	48,90
2	Jumlah penurunan laju peningkatan emisi GRK di 6 sektor	Juta ton CO ₂ eq	2,354	2,439	2,529	2,600	2,730	2,865
3	Jumlah partisipasi masyarakat, aparatur dan stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup	orang	20.000	600	700	800	900	1000
4	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Peraturan daerah bidang Lingkungan Hidup yang diterbitkan	Dok	0	0	1 dok Raperda	1 dok Perda	0	0
6	Laboratorium lingkungan hidup yang terakreditasi	Jenis Akreditasi	Terakreditasi dengan teregistrasi lingkup air	Terakreditasi dengan teregistrasi lingkup air dan udara	Terakreditasi dengan teregistrasi lingkup air dan udara	Terakreditasi dengan teregistrasi lingkup air dan udara	Terakreditasi dengan teregistrasi lingkup air dan udara	Terakreditasi dengan teregistrasi lingkup air dan udara

No	Urusan dan Indikator Kinerja	Satuan	Target					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
B. Urusan Penanggulangan Bencana								
1	Persentase Sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>)	%	na	na	20	20	20	20
2	Persentase kerugian akibat bencana	%	na	100	90	80	70	60
3	Jumlah masyarakat Siaga Bencana	orang	400	50	50	50	50	50
4	Jumlah Desa Tangguh	Desa	1	2	2	2	2	2
5	Jumlah kerjasama pencegahan dan penanggulangan bencana	MOU	na	na	1	1	1	1
6	Persentase penurunan titik kebakaran (hotspot)	%	na	na	20	20	20	20
C. Urusan Penataan Ruang								
1.	Jumlah peraturan daerah tentang penataan ruang	perda	13	1	2	2	-	-
	- RTRW							
	- Rencana Rinci		na	na	8	10	12	12
2.	Menurunnya jumlah konflik pemanfaatan ruang	Jumlah	0	11	15	15	20	23
3.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	na	60	75	80	80	90
4.	Panjang garis batas daerah yang disahkan	segmen	na	2	4	6	8	10
Urusan Pilihan								
C. Urusan Kehutanan								
1	Jumlah Identifikasi/Rencana lokasi permasalahan kawasan hutan yang dapat ditindaklanjuti dengan tata batas	Lokasi/ tahun	1	9	16	10	10	8
2	Jumlah Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH yang beroperasi	Unit/ tahun	11	2	2	3	3	3
3	Luasan Inventarisasi Sumber Daya Hutan Tingkat Provinsi	Ha/ tahun	na	156.281	338.964	657.114	473.972	473.972
4	Luas Lahan Kritis di dalam dan di luar kawasan hutan yang direhabilitasi (rehab HL/KSA/KPA dan HKm/HD)	Ha/ tahun	200	230	250	250	250	250
5	Jumlah penurunan laju deforestasi dan degradasi hutan	Ha/ tahun	200	200	200	200	200	200
6	Luas hutan tanaman	Ha/ tahun	102.701	70.000	75.000	80.000	80.000	80.000